
Analisis Diplomasi Budaya dan Peran Komunitas Muslim dalam Menghadapi Islamofobia dan Ketegangan Identitas di Paris

Kasta Alfian Nurhakim

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi

Email Korespondensi: kastaalfian.noor@hotmail.com

Abstract:

The phenomenon of Islamophobia in Paris reflects the tension between France's secularism and the public expression of Muslim religious identity. In this context, cultural diplomacy plays a crucial role as a soft approach to ease symbolic conflict and foster social coexistence. This study aims to analyze the role of cultural diplomacy and the contributions of local Muslim communities in addressing Islamophobia and identity tensions in public spaces across Paris. Employing a qualitative-descriptive approach through case studies and discourse analysis, this research highlights initiatives by communities such as the Institut des Cultures d'Islam and interfaith dialogue forums in promoting intercultural engagement. Findings reveal that despite being constrained by populist politics and state policies restricting religious symbols, cultural diplomacy can offer space for alternative narratives about Islam in French society. Through grassroots community involvement in arts, education, and media, cultural diplomacy becomes a strategic tool to counter stereotypes and build more inclusive social bridges within the city of Paris.

Keywords: Cultural Diplomacy; Islamophobia; Muslim Community; Identity; Paris

Abstrak:

Fenomena Islamofobia di Paris menjadi cerminan dari ketegangan antara prinsip sekularisme Prancis dan ekspresi identitas keagamaan umat Muslim. Dalam konteks ini, diplomasi budaya berperan penting sebagai pendekatan lunak dalam meredakan konflik simbolik dan membangun koeksistensi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi budaya dan kontribusi komunitas Muslim lokal dalam menghadapi Islamofobia serta krisis identitas yang terjadi di ruang publik Paris. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus dan analisis wacana, penelitian ini menyoroti berbagai inisiatif komunitas seperti Institut des Cultures d'Islam dan forum lintas iman dalam memperkuat dialog antarbudaya. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun terbatas oleh arus politik populis dan kebijakan negara yang represif terhadap simbol agama, diplomasi budaya mampu membuka ruang bagi narasi alternatif tentang Islam di tengah masyarakat. Dengan melibatkan komunitas akar rumput, seni, pendidikan, dan media, diplomasi budaya menjadi instrumen strategis dalam melawan stereotip dan membangun jembatan sosial yang lebih inklusif di kota Paris.

Kata Kunci: Diplomasi Budaya; Islamofobia; Komunitas Muslim; Identitas; Paris

Tentang Penulis:

Kasta Alfian Nurhakim adalah mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Saat ini, penulis sedang menempuh jenjang pendidikan sarjana dan aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, terutama dalam bidang diplomasi, media komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penulis merupakan penerima Beasiswa Bank Negara Indonesia (BNI) tahun 2025 dan pernah berpartisipasi sebagai delegasi Australia dalam ajang Model United Nations (MUN) yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin. Penulis juga telah menerbitkan artikel ilmiah berjudul "Pengaruh MNC terhadap Ekonomi Politik Host Country: Studi Kasus KFC di Jepang" dalam jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 5. Selain aktif menulis, penulis memiliki minat dalam kajian diplomasi budaya, Islam dan politik global, serta isu-isu identitas di kawasan Eropa

Email: kastaalfian.noor@hotmail.com

PENDAHULUAN

Paris sebagai pusat politik dan budaya Prancis tidak hanya mencerminkan wajah modernitas Eropa, tetapi juga menjadi ruang kontestasi yang kompleks antara nilai-nilai universal sekularisme dan keberagaman identitas, khususnya identitas keagamaan umat Muslim (Aziz, 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, isu Islam dan Muslim di Prancis, terutama di Paris dan sekitarnya, mengalami peningkatan tensi yang cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor mulai dari sejarah kolonialisme, pola migrasi pascakolonial, dinamika integrasi sosial, hingga respons terhadap gelombang terorisme global (Pertiwi, 2024). Berdasarkan laporan INSEE (*Institut National de la Statistique et des Études Économiques*) tahun 2019–2020, sekitar 10 persen dari populasi Prancis yang berusia 18 hingga 59 tahun adalah Muslim, dengan total sekitar 6 juta jiwa, menempatkan Prancis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat (Azizah, 2025).

Namun, kehadiran umat Muslim di ruang publik Prancis justru memunculkan tantangan identitas tersendiri. Prinsip *laïcité*, yakni bentuk sekularisme khas Prancis yang menuntut pemisahan tegas antara negara dan ekspresi keagamaan, telah mendorong kebijakan yang dinilai problematik oleh banyak kalangan (S. Esmano & Miranda, 2022). Kebijakan pelarangan simbol keagamaan di ruang publik dimulai dengan undang-undang tahun 2004 yang melarang penggunaan hijab di sekolah negeri, dan dilanjutkan dengan larangan cadar (*niqab*) pada tahun 2010. Bahkan, pada tahun 2023, muncul rancangan undang-undang yang melarang penggunaan abaya dan hijab bagi pelajar di bawah usia 18 tahun (VOA, 2021). Kebijakan-kebijakan tersebut kerap dianggap sebagai bentuk Islamofobia struktural, yaitu ketika institusi negara secara tidak langsung membatasi hak ekspresi religius kelompok Muslim.

Data statistik menegaskan bahwa diskriminasi terhadap Muslim di Prancis bersifat sistemik dan meluas. Survei IFOP-DILCRAH (*Institut Français d'Opinion Publique-Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT*) tahun 2019 menunjukkan bahwa 42 persen Muslim melaporkan mengalami pelecehan, angka ini meningkat menjadi 60 persen untuk wanita berhijab. Sekitar 37 persen mengalami pelecehan verbal, 14 persen mengalami kesulitan akses pekerjaan dan perumahan, serta 7 persen melaporkan kekerasan fisik (Gustiani et al., 2024). Laporan dari *Collectif Contre l'Islamophobie en France* (CCIF) juga menunjukkan lonjakan kasus Islamofobia dari 446 insiden pada tahun 2017 menjadi 676 insiden pada 2018, yang mencakup penyerangan fisik, vandalisme terhadap masjid, hingga kebijakan administratif yang diskriminatif terhadap organisasi Islam (Robby & Amrad, 2021). Di wilayah *Île-de-France* yang mencakup Paris

terdapat 229 kasus Islamofobia yang tercatat pada tahun 2015, dan lebih dari sepertiganya terjadi di wilayah Paris intra-muros (Darussalam, 2021).

Dalam konteks yang demikian menantang, diplomasi budaya muncul sebagai pendekatan strategis yang potensial untuk menjembatani ketegangan identitas dan memulihkan kepercayaan sosial antar kelompok. Diplomasi budaya diartikan sebagai penggunaan budaya baik melalui seni, sastra, dialog, maupun pendidikan, untuk memperkuat hubungan antar komunitas, membangun narasi alternatif, serta menciptakan ruang perjumpaan yang damai (Khatrunada & Alam, 2019). Di kota Paris, terdapat berbagai inisiatif yang diusung oleh komunitas Muslim dan lembaga lokal, seperti *Institut des Cultures d'Islam*, *Le Labo de la Fraternité*, dan berbagai festival budaya Islam yang didukung pemerintah kota (Chesneau, 2018). Institut des Cultures d'Islam, misalnya, telah menyelenggarakan lebih dari 200 pameran dan pertunjukan seni yang menampilkan karya seniman Muslim dengan tema identitas, diaspora, dan spiritualitas. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya menjadi ajang ekspresi budaya, tetapi juga wadah diplomasi informal yang efektif dalam melawan stereotip dan membangun pemahaman lintas identitas (Amran, 2025).

Secara teoritis, kajian ini merujuk pada dua pendekatan utama. Pertama, teori diplomasi budaya sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Nye (2004) dan Mark Leonard (2002), yang menekankan pentingnya soft power dalam membentuk persepsi positif dan pengaruh non-koersif dalam hubungan antar kelompok (Rohman & Sari, 2024). Diplomasi budaya berfungsi sebagai instrumen untuk membangun pemahaman bersama dalam situasi yang sarat konflik simbolik (Zamorano, 2016). Kedua, teori identitas sosial (Henri Tajfel: 1957) yang melihat identitas bukan sebagai entitas yang statis, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dinegosiasikan secara terus-menerus melalui interaksi antar kelompok dan dalam relasi dengan negara (McLeod, 2023). Dalam konteks Prancis, identitas Muslim sering dikonstruksikan sebagai "liyan " (*the other*), yang berdampak pada munculnya ketegangan simbolik dan institusional.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi budaya dan peran komunitas Muslim di Paris dapat berkontribusi dalam merespons Islamofobia serta memperkuat kohesi sosial di tengah tantangan identitas dalam negara sekuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus dan analisis wacana terhadap inisiatif-inisiatif diplomasi budaya yang dilaksanakan oleh aktor non-negara. Sumber data yang digunakan meliputi laporan NGO (CCIF, ENAR), dokumen kebijakan pemerintah kota Paris, hasil studi akademik, serta media daring seperti *Le Monde*, *France24*, dan *Al Jazeera*.

Dengan menelaah dinamika ini secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami praktik diplomasi budaya kontemporer di

kawasan urban Eropa, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan peran komunitas Muslim sebagai agen perdamaian dalam masyarakat pluralistik.

LANDASAN TEORITIK

Dalam menjelaskan fenomena Islamofobia dan dinamika ketegangan identitas umat Muslim di Paris, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritik yang menggabungkan tiga kerangka konseptual, yaitu teori diplomasi budaya, teori identitas sosial, dan konsep Islamofobia struktural. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menguraikan bagaimana komunitas Muslim melalui diplomasi budaya merespons marginalisasi simbolik di ruang publik dan menghadirkan narasi alternatif dalam sistem negara yang berideologi sekuler.

1. Diplomasi Budaya sebagai Paradigma Soft Power

Diplomasi budaya merupakan bentuk dari diplomasi publik yang bertujuan membangun hubungan antar masyarakat lintas negara melalui aktivitas budaya, seni, dan Pendidikan (Khatrunada & Alam, 2019). Teori ini berasal dari konsep soft power yang dikembangkan oleh Joseph Nye (2004), yaitu kemampuan suatu aktor dalam memengaruhi pihak lain melalui ketertarikan budaya dan nilai, bukan melalui paksaan (Grix & Brannagan, 2016). Dalam konteks hubungan internasional dan juga interaksi sosial domestik, diplomasi budaya menjadi instrumen strategis dalam membangun persepsi positif terhadap kelompok tertentu dan memperkuat pemahaman lintas identitas.

Mark Leonard (2002) menambahkan bahwa diplomasi budaya tidak harus dilakukan oleh negara, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh komunitas, kelompok minoritas, dan organisasi masyarakat sipil (Debby et al., 2022). Di tengah meningkatnya sentimen Islamofobia di Paris, diplomasi budaya yang dilakukan oleh komunitas Muslim melalui festival seni, dialog antariman, dan program edukatif dapat dilihat sebagai strategi diplomatik non-formal yang bertujuan merebut ruang simbolik, mengoreksi representasi yang menyimpang, serta memperkuat kohesi sosial.

2. Teori Identitas Sosial dan Konstruksi “*Liyan*”

Teori identitas sosial yang diperkenalkan oleh Henri Tajfel dan John Turner (1979) menjelaskan bahwa individu membentuk identitas sosialnya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Proses identifikasi ini secara alami menimbulkan dikotomi antara “kelompok dalam” (*in-group*) dan “kelompok luar” (*out-group*), yang sering kali menghasilkan prasangka sosial (Kish Bar-On & Lamm, 2023). Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini diperluas oleh Stuart Hall (1996) dan Tariq Modood (2007) melalui pendekatan kultural, yang menekankan bahwa identitas bukan bersifat tetap, melainkan

terbentuk dan dinegosiasikan dalam ruang sosial melalui wacana, simbol, dan praktik budaya (Werbner et al., 2015).

Dalam konteks Prancis, umat Muslim sering kali diposisikan sebagai “*liyan*” (*the other*) dalam diskursus publik negara yang menekankan pada integrasi sekuler (Udasmoro, 2017). Identitas Muslim menjadi identitas yang dikonstruksi dari luar sebagai simbol perlawanan terhadap nilai-nilai Republik, bukan sebagai bagian integral dari masyarakat Prancis itu sendiri. Karena itu, strategi diplomasi budaya digunakan sebagai upaya untuk mengklaim kembali representasi identitas secara aktif melalui ekspresi kultural dan dialog lintas batas simbolik.

3. Islamofobia Struktural sebagai Mekanisme Dominasi

Islamofobia tidak hanya hadir sebagai sikap individu, melainkan juga termanifestasi dalam struktur kebijakan negara, media, dan institusi publik. Konsep Islamofobia struktural mengacu pada bentuk diskriminasi yang dilembagakan, di mana negara secara sadar atau tidak sadar memproduksi kebijakan, retorika, dan perlakuan yang mendiskreditkan umat Islam sebagai komunitas yang homogen dan bermasalah (Elsheikh & Sisemore, 2024).

Kebijakan pelarangan simbol keagamaan, pengawasan masjid, hingga pembubaran organisasi Muslim di Prancis menunjukkan bagaimana negara memainkan peran dalam memperkuat narasi dominan tentang Muslim sebagai ancaman terhadap stabilitas republik (Pemred, 2025). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap ruang publik dan memperkuat marginalisasi identitas Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif naratif dengan pendekatan studi kasus dan teknik library research. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik diplomasi budaya yang dilakukan oleh komunitas Muslim di Paris sebagai respons terhadap tekanan identitas dalam negara sekuler. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara narasi kebudayaan, ketegangan identitas, dan respons masyarakat Muslim terhadap kebijakan negara (Fitriyah et al., 2024).

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah dan penentuan fokus penelitian, dilanjutkan dengan studi pendahuluan dan kajian literatur untuk menyusun kerangka konseptual. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan lembaga sipil, serta publikasi media daring yang kredibel. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis dengan menyusun narasi ilmiah yang menggambarkan hubungan antara diplomasi budaya, kebijakan negara, dan perlawanan simbolik komunitas Muslim.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen dan kebijakan resmi, mencakup kebijakan pemerintah Prancis terkait *laïcité*, larangan simbol agama, serta dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Paris dan lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri Prancis.
2. Laporan NGO dan lembaga internasional, seperti *Collectif Contre l'Islamophobie en France* (CCIF), *European Network Against Racism* (ENAR), *Amnesty International*, dan laporan-laporan dari *Institut des Cultures d'Islam*.
3. Publikasi ilmiah dan artikel akademik yang relevan dengan topik Islamofobia, diplomasi budaya, dan identitas Muslim di Eropa.
4. Media daring dan narasi public, diambil dari media seperti *Le Monde*, *France24*, *Al Jazeera*, *The Guardian*, serta media komunitas Muslim lokal di Paris.
5. Video dan arsip visual budaya, berupa dokumentasi pertunjukan, festival, dialog antariman, dan pameran yang diselenggarakan oleh komunitas Muslim sebagai bagian dari praktik diplomasi budaya.

Lalu selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dan wacana kritis. Proses ini meliputi:

1. Identifikasi tema utama dalam praktik diplomasi budaya, misalnya ekspresi seni, narasi resistensi, strategi komunikasi damai;
2. Kategorisasi wacana Islamofobia dalam media dan kebijakan, misalnya pelabelan “Islamisme radikal”, simbolisasi keagamaan sebagai ancaman publik;
3. Interpretasi atas praktik diplomasi budaya sebagai bentuk strategi sosial dan politik yang dijalankan oleh komunitas Muslim non-negara.

Melalui teknik ini, penulis berupaya untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik simbol, narasi, dan kebijakan yang menjadi medan kontestasi identitas di ruang publik Paris.

Validasi dilakukan melalui triangulasi teori, sumber, dan metode, untuk menguji konsistensi data antara berbagai jenis dokumen resmi, laporan lembaga independen, jurnal akademik, dan artikel media. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa narasi dan temuan yang dihasilkan memiliki landasan empiris dan teoritis yang kuat, serta dapat dipercaya (Nurfajriani et al., 2024).

Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Paris (*intra-muros*) dan sekitarnya di *Île-de-France*, dengan fokus temporal pada kurun waktu pasca-serangan *Charlie Hebdo* tahun

2015 hingga tahun 2024. Penelitian ini tidak menganalisis secara langsung kelompok ekstremis maupun respons keamanan negara, melainkan berfokus pada strategi budaya komunitas Muslim yang bersifat konstruktif dan damai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Islamofobia di Paris dan Manifestasi Strukturalnya

Fenomena Islamofobia di Paris tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang sekularisme Prancis dan cara negara mengelola identitas keagamaan dalam ruang public (Basri, 2022). Berdasarkan laporan tahunan *Collectif Contre l'Islamophobie en France* (CCIF), tercatat sebanyak 229 insiden Islamofobia terjadi di wilayah Paris dan sekitarnya (*Région Île-de-France*) pada tahun 2015. Angka ini melonjak menjadi 350 kasus pada 2017 dan mencapai puncaknya sebesar 415 insiden pada 2018. Penurunan terjadi pada 2019 dengan 235 kasus, sementara proyeksi untuk tahun 2024 memperkirakan kembali ke angka sekitar 280 insiden (Robby & Amrad, 2021). Insiden-insiden ini meliputi ujaran kebencian, perusakan masjid, diskriminasi administratif, serta kekerasan fisik terhadap individu Muslim.

Tabel 1
bentuk diskriminasi yang paling sering dialami oleh Muslim di Prancis

Jenis Diskriminasi	Persentase (%)
Muslim yang mengalami diskriminasi umum	42%
Perempuan Muslim berhijab	60%
Pelecehan verbal	37%
Hambatan dalam pekerjaan/perumahan	14%
Kekerasan fisik	7%

Sumber: IFOP-DILCRAH, 2019.

Data ini mengindikasikan bahwa diskriminasi tidak hanya hadir dalam bentuk simbolik atau verbal, tetapi juga mencakup aspek struktural seperti akses terhadap lapangan kerja dan perumahan. Perempuan berhijab merupakan kelompok yang paling terdampak, dengan angka diskriminasi mencapai 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan yang terlihat secara visual lebih rentan terhadap pengucilan sosial dan stereotip negatif.

Dalam kerangka teori Islamofobia struktural yang dikemukakan oleh Sayyid dan Wakil (2010), diskriminasi terhadap umat Muslim di Paris dapat dipahami sebagai hasil dari kebijakan dan praktik institusional negara yang mengonstruksi Islam sebagai entitas yang bertentangan dengan nilai-nilai republik (Shah, 2012). Sekularisme Prancis, atau *laïcité*, yang

semula dimaksudkan untuk menjamin netralitas agama dalam urusan negara, kini cenderung bertransformasi menjadi alat eksklusif terhadap ekspresi keagamaan yang tidak sesuai dengan norma dominan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti larangan hijab di sekolah negeri pada tahun 2004, pelarangan cadar di ruang publik pada tahun 2010, hingga regulasi pakaian keagamaan seperti abaya pada tahun 2023 (Anjani et al., 2023).

Lebih lanjut, pendekatan teoritik dari Stuart Hall (1996) mengenai identitas sosial menjelaskan bahwa umat Muslim dalam wacana publik Prancis sering kali dikonstruksikan sebagai "liyan" (the other) (Hall, 1996). Representasi ini diperkuat oleh arus utama media yang kerap mengaitkan Islam dengan ekstremisme, kekerasan, dan ancaman terhadap sekularisme. Representasi negatif ini tidak hanya mempersempit ruang dialog antaridentitas, tetapi juga memperkuat pembenaran terhadap tindakan-tindakan diskriminatif yang dilembagakan (Song et al., 2024).

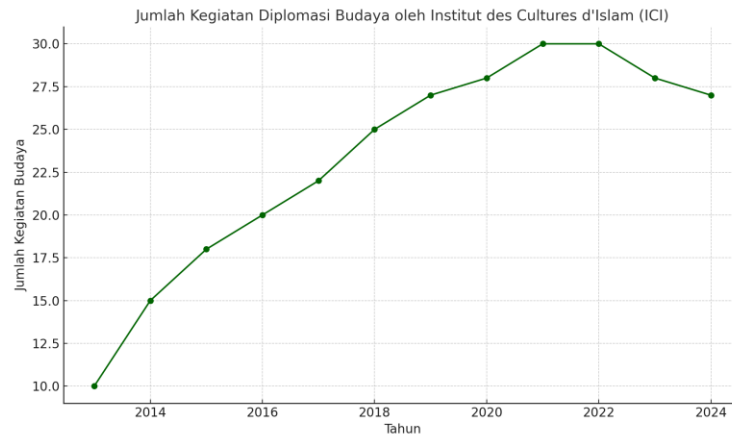
Dengan demikian, realitas Islamofobia di Paris merupakan produk dari interaksi kompleks antara struktur kebijakan negara, wacana media, dan konstruksi identitas sosial. Ketiganya saling memperkuat dalam menciptakan kondisi di mana umat Muslim tidak hanya diposisikan sebagai minoritas, tetapi juga sebagai ancaman simbolik terhadap homogenitas nilai-nilai republik.

Praktik Diplomasi Budaya oleh Komunitas Muslim Paris

Di tengah tekanan kebijakan negara dan persepsi publik yang penuh prasangka, komunitas Muslim di Paris tidak tinggal diam. Mereka mengembangkan strategi diplomasi budaya yang berfungsi sebagai instrumen untuk membangun pemahaman lintas identitas, memperluas narasi alternatif tentang Islam, serta memperkuat partisipasi budaya yang inklusif di tengah masyarakat sekuler. Salah satu lembaga utama yang menjalankan peran ini adalah *Institut des Cultures d'Islam* (ICI) yang berlokasi di *Arrondissement* ke-18 Paris (*Institut Des Cultures d'Islam - Culture - Leisure*.).

Sejak tahun 2013 hingga 2024, ICI telah menyelenggarakan lebih dari 200 kegiatan budaya yang mencakup pameran seni kontemporer bertema Islam, pertunjukan musik tradisional dan modern dari dunia Muslim, lokakarya kaligrafi dan arsitektur, serta diskusi terbuka tentang keislaman dan masyarakat urban (Yaghoobi & Seyed-Gohrab, 2021).

Gambar 1
bentuk diskriminasi yang paling sering dialami oleh Muslim di Prancis



Sumber: Institut des Cultures d'Islam, laporan kegiatan 2013–2023 dan estimasi 2024.

Grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan pada periode 2015–2020, dengan rata-rata 25–30 kegiatan budaya per tahun. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan seniman Muslim dari Prancis, tetapi juga kolaborasi internasional dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Diplomasi budaya di sini berfungsi sebagai soft power non-negara (Nye, 2004) yang menekankan kekuatan daya tarik, representasi naratif, dan pendekatan damai dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat luas.

Selain ICI, organisasi seperti *Le Labo de la Fraternité* turut aktif menyelenggarakan forum dialog antar agama yang melibatkan komunitas Muslim, Katolik, Yahudi, dan sekuler. Program seperti “*Forum Fraternité*”, “*Ramadan à Paris*”, dan lokakarya kaligrafi bersama menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi budaya digunakan untuk menciptakan ruang temu lintas identitas (La Fonda, 2017).

Tabel 2
kegiatan diplomasi budaya komunitas Muslim di Paris

Nama Kegiatan	Jenis Diplomasi	Penyelenggara
Pameran “Lumières d’Islam”	Seni visual	ICI Paris
Forum Fraternité	Dialog antariman	Le Labo de la Fraternité
Festival “Ramadan à Paris”	Budaya & kuliner	Majelis Muslim Paris & Mitra Lokal
Lokakarya Seni Kaligrafi	Edukasi budaya	Institut des Cultures d’Islam (ICI)
Proyeksi Film & Diskusi	Media alternatif	Mosquée de Paris & komunitas seniman

Sumber: Laporan ICI, situs resmi *Le Labo de la Fraternité*, dan katalog kegiatan seni Paris (2015–2023).

Melalui kegiatan-kegiatan ini, komunitas Muslim Paris membangun representasi alternatif terhadap citra Islam yang selama ini distigmatisasi oleh media dan narasi negara. Mereka menghadirkan wajah Islam yang kreatif, damai, dan penuh kontribusi terhadap kebudayaan urban. Hal ini sejalan dengan kerangka teori diplomasi budaya Mark Leonard (2002) yang menekankan peran komunitas dalam memperluas pengaruh kultural tanpa paksaan, serta teori Joseph Nye (2004) tentang soft power yang lahir dari daya tarik nilai, bukan dominasi politik (Nye, 2004).

Diplomasi budaya juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi sosial, terutama dalam masyarakat multikultural yang mengalami krisis kepercayaan antar identitas (Alkatiri, 2014). Ketika ruang publik sering kali menolak simbol-simbol keislaman, diplomasi budaya justru menjadikannya bagian dari ekspresi seni dan wacana kreatif. Inilah bentuk perlawanan simbolik yang tidak bersifat konfrontatif, melainkan kolaboratif dan partisipatif, yang memperluas ruang dialog dan mengikis polarisasi sosial.

Ruang Dialog dan Konfrontasi Wacana di Media Pendidikan

Kehadiran komunitas Muslim di Paris tidak hanya ditandai oleh ekspresi budaya, tetapi juga oleh upaya membangun ruang dialog dan melawan wacana negatif melalui pendidikan serta media alternatif (Pirol, 2009). Forum antariman seperti yang diadakan oleh *Le Labo de la Fraternité* telah menjadi medium penting dalam menjembatani kesenjangan persepsi antar komunitas beragama. Program ini dirancang untuk menghubungkan komunitas Muslim dengan Katolik, Yahudi, dan masyarakat sekuler melalui diskusi publik, lokakarya toleransi, serta kegiatan bersama yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan sipil.

Selain ruang fisik dialog, media menjadi medan penting dalam perjuangan wacana identitas (Kusman, 2018). Sebuah studi oleh *European Network Against Racism* (ENAR, 2018) menyebutkan bahwa mayoritas representasi Muslim dalam media Prancis cenderung dikaitkan dengan isu kriminalitas dan radikalisme (Zein, 2022). Media arus utama sering kali memproduksi narasi yang menyederhanakan komunitas Muslim sebagai kelompok homogen dan tertutup.

Namun, sebagai bentuk perlawanan, komunitas Muslim juga mengembangkan media alternatif, seperti majalah komunitas, akun media sosial, kanal YouTube, dan platform podcast yang menyuarakan narasi damai, multikulturalisme, serta keberhasilan komunitas Muslim di berbagai bidang. Misalnya, media digital seperti "*Oumma.com*" dan saluran dokumenter budaya dari komunitas *Mosquée de Paris* menyajikan konten yang membangun citra Islam sebagai bagian dari budaya Prancis (Zaid, 2023).

Upaya pendidikan multikultural juga menjadi elemen penting dalam memperkuat narasi alternatif. Sekolah-sekolah komunitas di wilayah-wilayah seperti Saint-Denis dan Montreuil mulai menyisipkan pendidikan toleransi dan sejarah Islam di Eropa dalam kurikulum lokal (State.gov, 2021). Langkah ini berupaya menyeimbangkan narasi historis dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap keberagaman budaya yang membentuk Paris modern.

Dalam kerangka teori Stuart Hall tentang representasi, media dan pendidikan menjadi arena produksi dan reproduksi makna identitas (Radja & Sunjaya, 2024). Representasi yang tidak seimbang atau bias tidak hanya menciptakan persepsi yang menyimpang, tetapi juga berkontribusi pada penguatan stigma dan diskriminasi. Maka dari itu, upaya komunitas Muslim dalam merebut kembali ruang narasi melalui dialog dan pendidikan adalah bentuk perlawanan simbolik yang strategis dan berjangka panjang.

Evaluasi Kritis atas Efektivitas Strategi Diplomasi Budaya

Evaluasi terhadap strategi diplomasi budaya yang dijalankan komunitas Muslim di Paris menunjukkan hasil yang positif namun tidak lepas dari berbagai tantangan. Secara substansial, diplomasi budaya telah berhasil membuka ruang dialog dan menggeser sebagian persepsi negatif terhadap Islam. Kegiatan yang konsisten oleh lembaga seperti ICI dan *Le Labo de la Fraternité* mampu menghadirkan narasi alternatif yang memperkuat integrasi sosial dan kohesi antar komunitas.

Namun, efektivitas diplomasi budaya ini tetap menghadapi beberapa hambatan besar. Pertama, tekanan struktural dari kebijakan negara, seperti pelarangan simbol keagamaan di sekolah dan ruang publik, tetap menjadi faktor penghambat utama (S. R. Esmano & Miranda, 2022). Kedua, populisme sayap kanan yang meningkat di Prancis dan Eropa Barat secara umum, menghidupkan kembali retorika xenofobia dan mempersulit penerimaan terhadap ekspresi keislaman (Stavrakakis et al., 2017). Ketiga, keterbatasan sumber daya komunitas Muslim menjadi kendala lain. Banyak kegiatan budaya bergantung pada pendanaan swadaya atau hibah jangka pendek, yang menyulitkan pembangunan program jangka Panjang (Hakim, 2023). Selain itu, tidak semua wilayah memiliki lembaga sekuat ICI, sehingga dampaknya cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.

Meski demikian, terdapat pula peluang besar untuk memperluas pengaruh diplomasi budaya ini. Pertama, keterlibatan generasi muda Muslim Prancis dalam dunia digital dan seni membuka jalur baru diplomasi virtual yang menjangkau audiens luas. Kedua, kolaborasi transnasional dengan komunitas diaspora Muslim di negara lain dapat memperkuat jejaring budaya dan solidaritas lintas batas (Tuzi & Omran, 2025). Ketiga, penguatan literasi media di kalangan komunitas Muslim dapat memperkuat kapasitas mereka dalam memproduksi dan mengelola narasi tandingan yang kuat.

Secara keseluruhan, diplomasi budaya komunitas Muslim di Paris telah menjadi instrumen yang relevan dan signifikan dalam menghadapi tantangan Islamofobia dan krisis identitas. Dalam perspektif teori soft power dan identitas sosial, praktik ini mencerminkan resistensi strategis yang berbasis nilai dan kreativitas budaya. Agar lebih efektif, diperlukan sinergi antara komunitas, negara, dan masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan representasi media yang adil (Shunnar et al., 2025).

Keseluruhan hasil yang telah diuraikan memperlihatkan keterkaitan erat antara struktur negara, respon komunitas, dan arena wacana dalam memahami dinamika Islamofobia di Paris. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamofobia bukan sekadar sikap individu, melainkan bagian dari sistem struktural yang dilembagakan melalui kebijakan negara, seperti pelarangan simbol keagamaan di ruang publik. Diskriminasi yang dialami perempuan berjilbab menandai pertemuan antara kontrol visual negara dan stereotip media yang mengonstruksi identitas Muslim sebagai "*liyan*". Hal ini memperkuat teori Islamofobia struktural serta gagasan Stuart Hall tentang identitas sosial yang dibentuk oleh kekuasaan representasi.

Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa komunitas Muslim di Paris tidak diam menghadapi tekanan ini. Melalui institusi seperti *Institut des Cultures d'Islam* (ICI) dan *Le Labo de la Fraternité*, mereka mengembangkan praktik diplomasi budaya yang menjawab narasi eksklusi dengan narasi keterbukaan. Pameran seni, dialog antariman, hingga lokakarya kaligrafi menjadi bentuk ekspresi budaya yang merangkul publik luas. Strategi ini mencerminkan konsep soft power dari Nye dan pendekatan Leonard mengenai diplomasi budaya, di mana nilai, estetika, dan narasi menjadi alat untuk membangun pengaruh tanpa paksaan.

Ketiga, dalam penelitian ini dimensi naratif menjadi fokus utama. Representasi Islam dalam media arus utama yang cenderung menyederhanakan dan menstigmatisasi, dilawan dengan media alternatif seperti "*Oumma.com*" dan kanal komunitas. Pendidikan multikultural di wilayah pinggiran kota Paris memperluas ruang produksi pengetahuan yang lebih adil. Dalam konteks Teori Representasi Hall, ini adalah bentuk perjuangan simbolik yang bertujuan menggeser dominasi makna dan memperluas horizon kesadaran kolektif. Ruang wacana menjadi arena penting di mana diplomasi budaya menyentuh dimensi imajinatif dan ideologis dari identitas Muslim di Prancis.

Keempat, penelitian ini menawarkan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah dijalankan. Meski diplomasi budaya terbukti membangun narasi alternatif dan memperkuat kohesi sosial, tantangan besar masih menghadang. Populisme kanan, keterbatasan sumber daya, dan kebijakan negara yang rigid menjadi hambatan struktural. Namun, potensi kolaborasi

lintas negara, keterlibatan pemuda Muslim dalam dunia digital, dan berkembangnya kesadaran representasi menjadi peluang besar. Strategi ini memerlukan dukungan dari berbagai aktor negara, komunitas, media, dan lembaga pendidikan agar dapat bertransformasi dari sekadar inisiatif komunitas menjadi kebijakan kebudayaan yang transformatif.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa diplomasi budaya oleh komunitas Muslim di Paris adalah respons kreatif, strategis, dan bermakna terhadap tantangan Islamofobia dan krisis identitas. Ia berakar pada realitas struktural, tetapi tumbuh dalam ruang naratif, simbolik, dan kolaboratif. Dalam kondisi sosial-politik yang terus berubah, diplomasi budaya menawarkan jalan tengah antara resistensi dan rekonsiliasi, antara ekspresi dan integrasi, antara kritik dan kolaborasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Islamofobia di Paris merupakan fenomena struktural yang dilembagakan melalui kebijakan negara dan diperkuat oleh wacana media serta representasi identitas yang menyudutkan komunitas Muslim, khususnya perempuan berjilbab. Meskipun demikian, komunitas Muslim tidak bersikap pasif, melainkan aktif membangun strategi diplomasi budaya sebagai respon konstruktif terhadap tekanan tersebut.

Diplomasi budaya yang dijalankan oleh komunitas Muslim Paris melalui seni, media alternatif, pendidikan multikultural, dan dialog antariman terbukti efektif dalam menciptakan ruang naratif yang inklusif dan merepresentasikan Islam dalam wajah yang damai serta berkontribusi terhadap masyarakat urban. Strategi ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga membangun model diplomasi non-negara yang potensial untuk diterapkan secara luas dalam konteks pluralisme dan krisis identitas di negara-negara sekuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, J. (2014). *Ahmadiyah Qadian Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya Kajian Tentang Agama Di Ruang Publik* | PDF.
<https://www.scribd.com/document/489025868/Ahmadiyah-Qadian-Dalam-Perspektif-Komunikasi-Antarbudaya-Kajian-Tentang-Agama-Di-Ruang-Publik>
- Amran, S. (2025, Sabtu, Mei). *Islamofobia dan Media Barat: Melawan Narasi yang Menyesatkan* - Suara Nanggroe - Halaman 2. Islamofobia dan Media Barat: Melawan Narasi yang Menyesatkan - Suara Nanggroe - Halaman 2.
<https://www.suarananggroe.com/budaya-dan-agama/76715261720/islamofobia-dan-media-barat-melawan-narasi-yang-menyebabkan?page=2>
-

- Anjani, M. M., Zuhdi, Z. A., & Alamanda, A. T. (2023). *Problematika Larangan Berhijab Di Prancis*.
- Aziz, A. (2024). Marseille in uproar: Secularism, multiculturalism, and urban degradation in the city of immigrants. *Identities*, 1–20.
<https://doi.org/10.1080/1070289X.2024.2444106>
- Azizah, Z. (2025, March 13). Negara Eropa dengan Populasi Muslim Terbanyak. *Ultimate Education*. <https://www.ultimateducation.co.id/negara-negara-di-eropa-dengan-populasi-muslim-terbanyak>
- Basri, M. R. (2022). DILEMA NEGARA SEKULER PRANCIS: DI ANTARA TARIKAN ISLAMOFOBIA DAN FUNDAMENTALISME AGAMA. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 143. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i1.3127>
- Chesneau, A. (2018, November 24). Luar Biasa! Ada Perayaan Grebeg Maulud digelar di Paris. *Surat Dunia*. <https://suratdunia.com/2018/11/25/luar-biasa-ada-perayaan-grebeg-maulud-digelar-di-paris/>
- Darussalam. (2021, November 8). Serangan Islamofobia Lagi, 3 Masjid Prancis Jadi Target. *Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur*. <https://darussalam.id/serangan-islamofobia-lagi-3-masjid-prancis-jadi-target/>
- Debby, D., Yasmin, F., & Afrilia, R. (2022). Gastrodiplomacy Budaya Melalui Makanan Jepang di Restoran Ramen Seirock-Ya. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 12331–12341. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9320>
- Elsheikh, E., & Sisemore, B. (2024, November 25). *Legalizing Othering: Institutionalized Islamophobia and the Subversion of U.S. Democracy*.
<https://www.americanbar.org/groups/crsj/resources/human-rights/2024-november/islamophobia-and-subversion-of-us-democracy/?emci=1f32b1c0-56cd-ef11-88d0-0022482a9d92&emdi=6535e046-74d3-ef11-88d0-0022482a9d92&ceid=15218762>
- Esmano, S., & Miranda, A. (2022). PENGARUH KEBIJAKAN LAÏCITÉ TERHADAP MUSLIM DI INSTITUSI PENDIDIKAN NEGERI PRANCIS PADA MASA PEMERINTAHAN MACRON. *Multikultura*, 1(1).
<https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1082>
- Esmano, S. R., & Miranda, A. (2022). *PENGARUH KEBIJAKAN LAÏCITÉ TERHADAP MUSLIM DI INSTITUSI PENDIDIKAN NEGERI PRANCIS PADA MASA PEMERINTAHAN MACRON*.
-

Fitriyah, T., Muharamah, U., Hak, N., Yuwono, D. M., Latifi, Y. N., & Ni'mah, U. N.

(2024). *Editor: Tika Fitriyah, M.Hum, dkk.*

Grix, J., & Brannagan, P. M. (2016). Of Mechanisms and Myths: Conceptualising States' "Soft Power" Strategies through Sports Mega-Events. *Diplomacy & Statecraft*, 27(2), 251–272. <https://doi.org/10.1080/09592296.2016.1169791>

Gustiani, M., Aâ€™la, A., & Sholihah, I. (2024). Hegemoni Pemerintah Negara Sekuler: Diskriminasi terhadap Muslim di Perancis. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v12i1.17411>

Hakim, S. A. (2023, Agustus). Awal Mula Kehidupan Muslim di Eropa Hingga Muncul Islamofobia | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi. <https://uinjkt.ac.id/index.php/id/awal-mula-kehidupan-muslim-di-eropa-hingga-muncul-islamofobia>

Hall, S. (1996). *Cultural Identity and Diaspora*.

Institut des Cultures d'Islam—Culture—Leisure. (n.d.). Paris Je t'aime - Tourist Office. Retrieved June 28, 2025, from <https://parisjetaime.com/eng/culture/institut-des-cultures-d-islam-p3586>

Khatrunada, S. A., & Alam, G. N. (2019). Diplomasi Budaya Indonesia melalui International Gamelan Festival 2018 di Solo. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26125>

Kish Bar-On, K., & Lamm, E. (2023). The interplay of social identity and norm psychology in the evolution of human groups. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 378(1872), 20210412. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0412>

Kusman, A. P. (2018). Islam dan Media: Kontestasi Ideologi dan Ekonomi Politik Media Era Demokrasi. *MAARIF*, 13(1), 3–8. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i1.8>

La Fonda. (2017). *Le Labo de la Fraternité*. <https://fonda.asso.fr/organisations/le-labo-de-la-fraternite>

McLeod, S. (2023, October 5). *Social Identity Theory In Psychology (Tajfel & Turner, 1979)*. <https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html>

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgan, M. W. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>

Nye, J. S. (2004). Soft Power and American Foreign Policy. *Political Science Quarterly*, 119(2), 255–270. <https://doi.org/10.2307/20202345>

- Pemred. (2025, May 9). Genealogi Negara Bangsa dalam Perspektif Islam: Tinjauan Teori Sosial Kritis. *Kepri Pos*. <https://kepripos.id/genealogi-negara-bangsa-dalam-perspektif-islam-tinjauan-teori-sosial-kritis/>
- Pertiwi, I. A. M. S. Y. (2024, July 2). *Perancis Dalam Membentuk Kebijakan Anti-Separatisme Muslim Era Presiden Macron* | *kumparan.com*. Perancis Dalam Membentuk Kebijakan Anti-Separatisme Muslim Era Presiden Macron. <https://kumparan.com/dayusukma0/perancis-dalam-membentuk-kebijakan-anti-separatisme-muslim-era-presiden-macron-232a8pqFh1W>
- Pirol, A. (2009). *Sisi-sisi modernitas refleksi berbagai aspek ajaran Islam* (Baderiah, Ed.). LPK-STAIN Palopo.
- Radja, I. G. S., & Sunjaya, L. R. (2024). Representasi Budaya Jember dalam Jember Fashion Carnival: Pendekatan Teori Representasi Stuart Hall. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 13–20. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.160>
- Robby, H. M. F., & Amrad, A. (2021). AN ANALYSIS ON THE ISLAMOPHOBIC ACTS IN FRANCE POST-ARAB SPRING. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 250–271. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2085>
- Rohman, R. N. F., & Sari, V. P. (2024). GASTRODIPLOMASI KOPI INDONESIA MELALUI SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICAN EXPO 2021. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i1.43129>
- Shah, P. (2012). S. Sayyid and Abdoolkarim Vakil (eds): Thinking through Islamophobia: Global Perspectives. x, 319 pp. London: C. Hurst & Co., 2010. £15.99. ISBN 978 1 85065 990 7. - Chris Allen: Islamophobia. vii, 210 pp: Farnham: Ashgate, 2010. £16.99. ISBN 978 0 7546 5140 6. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 75(2), 397–399. <https://doi.org/10.1017/S0041977X12000250>
- Shunnar, S., Ukka, Ibrahim. T., & Amori, M. (2025). Cultural Identity Theory Impact in Boosting National Identity, Palestinian Media Elites’ Views. *Advances in Applied Sociology*, 15(02), 131–171. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2025.152008>
- Song, W., Pang, B., Wang, Z., Xu, Y., Liu, Z., & Tan, M. (2024). Differentiated secularism: Discourse shaping of immigrants from different religious backgrounds in the French media. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 893. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03390-x>
- State.gov. (2021). *FRANCE 2021 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT*.
-

Stavrakakis, Y., Katsambekis, G., Nikisianis, N., Kioupiolis, A., & Siomos, T. (2017).

Extreme right-wing populism in Europe: Revisiting a reified association. *Critical Discourse Studies*, 14(4), 420–439. <https://doi.org/10.1080/17405904.2017.1309325>

Tuzi, I., & Omran, L. (2025, March 27). *Bridging Struggles Across Borders*.

<https://aljumhuriya.net/en/2025/03/27/bridging-struggles-across-borders/>

Udasmoro, W. (2017, June 1). *The language construction of Muslims as the others in French contemporary discourses: Library Catalog*. <https://elibrary.stipram.ac.id/Record/doaj-c07cacd154104f52bd6042182cf272c6>

VOA. (2021, May 16). *Jangan Sentuh Hijab Saya! Perempuan Muslim Perancis Tolak Rencana Larangan Berhijab*. VOA Indonesia.

<https://www.voaindonesia.com/a/jangan-sentuh-hijab-saya-perempuan-muslim-perancis-tentang-rencana-larangan-berhijab-/5892411.html>

Werbner, P., Modood, T., & Bhabha, H. K. (Eds.). (2015). *Debating cultural hybridity: Multicultural identities and the politics of anti-racism*. Zed Books.

<https://doi.org/10.5040/9781350219496>

Yaghoobi, C., & Seyed-Gohrab, A. (2021). □□□□ □□□□□.

<https://www.irannamag.com/en/article/page/2/>

Zaid, N. (2023, January 22). *La grande mosquée de Paris, Mercusuar Islam di Prancis*.

<https://m.oase.id/read/R1AXGR-la-grande-mosqu-e-de-paris-tonggak-islam-di-prancis>

Zamorano, M. M. (2016). Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory. *Culture Unbound*, 8(2), 165–186.

<https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.1608165>

Zein, A. (2022, February 15). *Serangan Terhadap Muslim Mengkhawatirkan di Prancis*.

<https://www.katakini.com/artikel/60716/serangan-terhadap-muslim-mengkhawatirkan-di-prancis/>
